

Pengaruh Budaya Sunda Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik

Laila Habibah Nurfalah^{1*}, Elis Robiatul Adawiah², Zidan Jamaludin³

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*Corresponding Author: lailahn1228@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menyoroti pengaruh budaya Sunda terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik di Jawa Barat. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki nilai-nilai yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Namun, penerapannya sering dipengaruhi oleh keberagaman budaya lokal. Budaya Sunda yang berkembang di Jawa Barat dan Banten mengedepankan nilai gotong royong, musyawarah, dan kesederhanaan—yang sejalan dengan prinsip Pancasila. Menggunakan metode literature review, penelitian ini menganalisis berbagai sumber terkait budaya Sunda, nilai Pancasila, dan kebijakan publik. Hasil menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai budaya Sunda mulai diakomodasi dalam kebijakan publik, implementasinya masih terbatas pada aspek simbolik, seperti pakaian adat dan ornamen khas. Beberapa program seperti "Desa Mandiri" dan Musrenbang sudah mencerminkan nilai gotong royong dan musyawarah mufakat sebagaimana dalam budaya Sunda dan Pancasila.

kata kunci: Budaya Sunda; Kebijakan Publik; Pancasila.

Abstract: This study highlights the influence of Sundanese culture on the implementation of Pancasila values in public policy in West Java. As the foundation of the nation, Pancasila holds values that are relevant in facing the challenges of globalization and technological advancement. However, its application is often influenced by the diversity of local cultures. Sundanese culture, which has developed in West Java and Banten, emphasizes the values of mutual cooperation (gotong royong), deliberation (musyawarah), and simplicity—all of which align with the principles of Pancasila. Using a literature review method, this study analyzes various sources related to Sundanese culture, Pancasila values, and public policy. The findings indicate that while Sundanese cultural values have begun to be accommodated in public policy, their implementation remains largely symbolic, such as the use of traditional attire and Sundanese ornaments. Several programs, such as the "Desa Mandiri" (Self-Reliant Village) initiative and Musrenbang (Development Planning Deliberation), already reflect the values of mutual cooperation and consensus-based deliberation.

Keywords: Sundanese Culture; Public Policy; Pancasila.

Pendahuluan

Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat adanya globalisasi dan kemajuan di bidang teknologi. Hal ini sejalan dengan (Faujan & Dewi, 2023) dan (Vania et al., 2021) yang menerangkan bahwa diterapkannya nilai-nilai Pancasila merupakan suatu bentuk perlawanan penyimpangan moral dan pemandu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu, Pancasila juga menjadi pengarah dalam menjaga rasa persatuan (Adelia et al., 2024).

Dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila tidak selalu diterjemahkan secara sama di seluruh wilayah Indonesia, karena Indonesia telah mengalami perubahan sosial dan politik terutama dalam diversitas budaya dan agama (Tsania et al., 2024). Diperlukan pendidikan karakter untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan dalam membentuk karakter harus didukung oleh penciptaan suasana yang memang selaras dengan karakter yang ingin dikembangkan (Kembara et al., 2021)

Salah satu budaya yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam implementasi nilai-nilai Pancasila adalah Budaya Sunda, yang berkembang di daerah Jawa Barat dan Banten. Budaya Sunda memiliki karakteristik seperti solidaritas, kasih sayang, sosialisasi, dan religiusitas (Rahman et al., 2018). Nilai-nilai kesundaan tersebut antara lain adalah cagur (sehat), bageur (baik), singer (introspektif), dan pinter (pintar) (Yusuf, 2021). Kemudian nilai lainnya yaitu gotong royong, musyawarah, kesederhanaan, dan kerukunan yang mana sangat sesuai dengan kelima sila yang terdapat di dalam Pancasila.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kami susun rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana budaya Sunda mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik saat ini?"

Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Seberapa besar pengaruh budaya Sunda terlihat dalam kebijakan publik di wilayah Jawa Barat saat ini? 2) Apa contoh kebijakan publik di wilayah Sunda yang berhasil mencerminkan nilai-nilai Pancasila? 3) Apa saja tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan nilai-nilai budaya Sunda dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan publik?

Penelitian merupakan salah satu bentuk pengamalan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian (Maftuh et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut: 1) tantangan Mengamati pengaruh budaya Sunda terhadap kebijakan publik di Jawa Barat 2) Mengidentifikasi yang dihadapi saat mencoba menggabungkan nilai-nilai budaya Sunda ke dalam kebijakan publik yang berbasis Pancasila.

Kajian Pustaka

1. Budaya Sunda

Kebudayaan Sunda merupakan kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dikalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomisili di Tanah Sunda. Budaya Sunda adalah salah satu warisan budaya yang kaya di Indonesia, mencakup nilai-nilai, tradisi, dan praktik yang telah ada selama berabad-abad. Nilai-nilai dalam budaya Sunda menekankan kandangan (kerja keras), bageur (baik hati), silih asah (saling memperbaiki), silih asih (saling mengasihi), silih asuh (saling menjaga) (Fitriyani et al., 2015; Kembara et al., 2021a). Hal ini

menjadi dasar perilaku sosial masyarakat baik dalam kehidupan suku Sunda sendiri ataupun di luar suku Sunda. Keluarga memainkan peran kunci dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini melalui sosialisasi dan internalisasi, yang sangat penting untuk melestarikan identitas budaya Sunda di tengah arus globalisasi.

2. Nilai Pancasila

Pancasila merupakan sistem yang memberikan persyaratan dan pedoman terhadap sikap dan karakter bangsa Indonesia (Salsabila et al., 2024). Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki lima sila yang berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini perlu diinternalisasi oleh masyarakat agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian, mereka dapat berkontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa (Damanhuri et al., 2016). Pancasila diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan modern, termasuk penyimpangan moral akibat globalisasi (Faujan & Dewi, 2023).

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Wahyuningsih, 2019). Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun yang pemerintah lakukan merupakan sebuah kebijakan publik.

Kebijakan publik di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan Pancasila. Di Sumedang, misalnya, pemerintah daerah meluncurkan kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) yang bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Sunda ke dalam praktik pemerintahan (Herdiana, 2023).

Keterkaitan antara Budaya Sunda, Pancasila, dan Kebijakan Publik

Keterkaitan antara budaya Sunda, nilai-nilai Pancasila, dan kebijakan publik terlihat dari bagaimana kebijakan dapat mengadopsi dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang ada. Elemen-elemen ini membentuk nilai yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat Sunda sendiri.

Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara budaya Sunda, nilai-nilai Pancasila, dan kebijakan publik di Indonesia. Melalui keharmonisan antara ketiganya, diharapkan kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan melestarikan identitas budaya di tengah arus globalisasi. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Dengan metode ini, bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, berbagai sumber yang relevan sehingga memahami bagaimana budaya Sunda mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik saat ini. Kami berharap dengan pendekatan ini, bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan komprehensif tentang topik yang dibahas.

1. Mencari artikel
2. Mengidentifikasi topik (analisis artikel)
3. Membaca artikel dan memahami isinya
4. Membuat tabel literature review untuk mempermudah penyusunan

Hasil dan Pembahasan

Herdiana (2023) mengatakan bahwa secara substansi nilai-nilai yang dikandung dalam budaya Sunda baru terwujud secara filosofis berupa nilai-nilai kesundaan, belum sampai pada nilai praktis atau operasional. Prakteknya secara materil berupa penggunaan pakaian adat oleh aparatatur pemerintahan, pembangunan infrastruktur pemerintahan dengan ornamen-ornamen yang menjadi ciri khas budaya lokal. Praktek secara non-materil berupa penggunaan nilai, norma dan bahasa lokal sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rahmatiani (2016) menyatakan bahwa implementasi pembangunan di era otonomi daerah belum sepenuhnya mencerminkan potensi serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya kearifan lokal sunda, agar program yang dijalankan dapat selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Berikut beberapa contoh dari kebijakan publik yang berhasil menggambarkan pengaruh budaya Sunda terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila di Jawa Barat:

Gotong Royong dalam Program "Desa Mandiri"

Konsep "desa mandiri" (desa independen) berfokus pada pengembangan daerah pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi (Nugraha & Saputra, 2023)

Program Desa Mandiri digagas oleh pemerintah Jawa Barat dengan membuat kolaborasi dalam mengembangkan ekonomi warga lokal. Program ini juga memperlihatkan budaya gotong royong masyarakat Sunda yang sangat lekat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Musyawarah untuk Mufakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

Musrenbang merupakan forum perencanaan pembangunan tahunan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan dalam membuat rencana pembangunan nasional dan daerah.

Musrenbang juga merupakan suatu forum yang membahas perencanaan dan pembangunan desa, dan juga memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan dalam membuat rencana pembangunan nasional dan daerah.

Budaya musyawarah yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Sunda tercermin dalam kebijakan Musrenbang. Proses ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, dari tokoh adat hingga pemerintah daerah, dalam merencanakan pembangunan di tingkat desa dan kota. Dalam budaya Sunda, keputusan yang diambil melalui musyawarah dianggap lebih adil dan bijaksana karena melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Sulaiman et al., 2015). Prinsip permusyawaratan dalam Pancasila pun dijunjung tinggi dalam kebijakan ini, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan bersama, mencerminkan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Pengaruh budaya Sunda pada implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan publik memiliki tantangan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Rahmatiani (2016) menyoroti tentang pandangan orang-orang terhadap kebijakan berbasis kearifan lokal yang bersifat kedaerahan dan tradisional sebagai kemunduran demokrasi karena seolah-olah kembali pada masa lampau sedangkan era sudah modern. Ditambah adanya perilaku anarkis yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes akan kebijakan pemerintah, menandakan bahwa masih ada ketimpangan orientasi pembangunan yang dimaksud

pemerintah dengan anggapan masyarakat akan orientasi yang bersangkutan itu. Tantangan selanjutnya adalah kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang belum efektif. Sektor swasta terkesan menganggap pemberdayaan masyarakat hanya sekedar formalitas saja. Hal ini juga diakibatkan oleh kecerobohan pemimpin daerah dalam peluang terjadinya "kolusi dan nepotisme".

Hal tersebut didukung pernyataan dari Herdiana (2023) yang mengatakan bahwa faktor penghambat ataupun tantangan dari implementasi kebijakan terdiri dari dua faktor yaitu; substansi kebijakan mengenai nilai-nilai budaya Sunda yang belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kedua, pemangku kepentingan tidak sepenuhnya memiliki pemahaman tentang nilai-nilai Sunda dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Simpulan

Secara keseluruhan, meskipun nilai-nilai budaya Sunda sudah mulai terlihat dalam kebijakan publik di Jawa Barat, penerapannya masih sebatas konsep atau simbol. Misalnya, kita bisa melihat penggunaan pakaian adat dan ornamen khas Sunda di ruang pemerintahan, serta penerapan bahasa nilai-nilai lokal. Namun, nilai-nilai ini belum benar-benar "terwujud" dalam konteks kebijakan publik, yang lebih bersifat praktis dan operasional.

Beberapa program seperti "Desa Mandiri" dan Musrenbang menunjukkan bagaimana budaya Sunda, dengan semangat gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, bisa diterapkan dalam pembangunan. Konsep musyawarah untuk mufakat, misalnya, sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada kebersamaan dan keadilan. Tapi di sisi lain, implementasi kebijakan yang berbasis kearifan lokal ini masih menghadapi berbagai tantangan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa kebijakan seperti ini justru mengarah pada kemunduran atau kembali ke masa lalu, yang bisa jadi membuat kebijakan berbasis kearifan lokal dianggap kurang relevan dengan era modern sekarang.

Selain itu, masih ada kesenjangan antara apa yang diinginkan pemerintah dan harapan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta pun sering kali belum berjalan dengan efektif. Kadang-kadang sektor swasta hanya melihat pemberdayaan masyarakat sebagai formalitas, dan ada juga kekhawatiran tentang praktik kolusi atau nepotisme yang bisa menghambat proses pembangunan. Tak kalah penting, pemahaman tentang nilai-nilai budaya Sunda di kalangan pemangku kebijakan juga masih belum merata, yang membuat penerapannya dalam pembangunan menjadi kurang maksimal.

Meskipun ada usaha untuk memasukkan nilai-nilai budaya Sunda dalam kebijakan publik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar budaya lokal ini benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pemerintahan dan pembangunan yang lebih adil dan merata.

Referensi

- Adelia, Vinasty, R. Z., Monica, C., Wangisuta, G. M., Salsabila, K. S., & Kembara, M. D. (2024). Implikasi Kemajuan Teknologi Terhadap Jiwa Nasionalisme Dan Semangat Cinta Tanah Air Terhadap Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 888–902. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/951/866>
- Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2), 185–198. <https://doi.org/10.30870/ucej.v1i2.1890>

- Faujan, I. F. N., & Dewi, D. A. (2023). Implementasi Pancasila Secara Komprehensif Menghadapi Tantangan Zaman Teknologi. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 3(2), 37–44. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i12.276> Pengetahuan pelajar tentang nilai-nilai Pancasila untuk mempertahankan ideologi negara
- Fitriyani, A., Suryadi, K., & Syam, S. (2015). Peran Keluarga Dalam Mengembangkan Nilai Budaya Sunda. *Sosietas*, 5(2). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i2.1521>
- Herdiana, D. (2023). Sumedang Puseur Budaya Sunda: Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.5779>
- Kembara, M. D., Rozak, R. W. A., Hadian, V. A., Nugraha, D. M., Islami, M. R. F., & Parhan, M. (2021a). Etnisitas dan Kearifan Lokal: Penerapan Nilai-Nilai Budaya Sunda dalam Pembentukan Karakter Generasi Milenial. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 1–17.
- Kembara, M. D., Rozak, R. W. A., Hadian, V. A., Nugraha, D. M., Islami, M. R. F., & Parhan, M. (2021b). Perilaku Sunda Sebagai Entitas Karakter Kebangsaan yang Terancam Hilang. *Studi Budaya Nusantara*, 5(1), 13–26.
- Maftuh, B., Sartika, R., & Kembara, M. D. (2020). Pengembangan mata kuliah pendidikan sosial budaya berbasis pendidikan karakter kebangsaan dan berorientasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 18(1), 26–32. <https://ejournal.upi.edu/index.php/SosioReligi/article/view/28724>
- Neila Kholilatus Tsania, Talitha Lutfi Buchari, Suci Anugrah Tryana Hikmah, Nisrina Raudhah, & Maulia Depriya Kembara. (2024). Dinamika Wawasan Demokrasi : "Integrasi Nasional Dan Tantangan Membentuk Warga Negara Yang Berwawasan." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 72–78. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3700>
- Nugraha, A., & Saputra, Y. (2023). Independent creative village program as an effort to prosper the community based on village potential. *Journal of Community Service in Science and Engineering (JoCSE)*, 2(2), 42. <https://doi.org/10.36055/jocse.v2i2.21835>
- Rahman, A. A., Fitriah, E. A., & Mulyana, A. (2018). *Etnik Sunda*. 1(1), 1–8.
- Rahmatiani, L. (2016). Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.36805/civics.v1i1.30>
- Salsabila, N., Lestari, A., Tsaqila, A. N., & Kembara, M. D. (2024). Maraknya Tindakan Kriminal Yang Menyalahi Sistem Etika Pancasila. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), 63–70. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article/view/3366/2565>
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 367. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1467>
- Vania, A. S., Dewi, D. A., Robi'ah, F., Nugraha, I. F. C., & Furnamasari, Y. F. (2021). Revitalisasi Pancasila dalam Memfilter Dampak Globalisasi dan Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5227–5233. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1612>
- Wahyuningsih, C. D. (2019). Kebijakan Publik Pada Masyarakat Multikultural. *Mimbar Administrasi*, 15(29), 14–30.
- Yusuf, M. D. (2021). Budaya Sunda "Pemberdayaan Saung Rangon Sebagai Markas Kreasi Mahasiswa" dalam Mengatasi Kelesuan Ekonomi Dampak Virus Corona. *Global Mind*,

3(1), 3–49. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>